

REDENOMINASI RUPIAH DALAM KAJIAN EKONOMI MONETER Oleh : Anwar Rahim

Abstract :

Economic growth in Indonesia since the 1997-1998 economic crisis has shown encouraging performance. Five years of economic growth shows an average rate above 5 percent per month. Even in the global financial crisis hit the world, Indonesia is one of the countries that paid money in circulation by reducing the debit banking consumptive nature-debit (credit cards, mortgages, car loans, etc.) and more focused on the productive sectors (especially the more use of imported materials) or export-oriented business. The banks gave incentives to the implementation of these efforts by lowering interest rates credit (working capital and investment) so that the industrial sector is more passionate. Government c.q (Bank Indonesia) to control monetary stability, especially interest rates, kredit, foreign exchange rates provide facilities such as discounts, increasing minimum reserve requirements, moral appeal even if the necessary BI could invest in the money market. Monetary stability and the passion of the productive sector is expected to absorb many labor and increase exports.

Keywords: *Redenominasi Rupiah*

Abstraksi :

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak mengalami krisis ekonomi 1997-1998 telah menunjukkan kinerja yang mengembirakan. Lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka rata-rata di atas 5 persen per bulan. Bahkan di masa krisis keuangan global melanda dunia, Indonesia adalah salah satu dari negara Sirkulasi uang yang disetor perbankan dengan mengurangi debit-debit yang bersifat konsumtif (kartu kredit, KPR, kredit mobil, dll) dan lebih difokuskan pada sektor usaha yang produktif (terutama yang lebih banyak menggunakan bahan-bahan impor) atau usaha yang berorientasi ekspor. Bank-bank pelaksanaan memberi insentif kepada usaha-usaha tersebut dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit (modal kerja dan investasi) sehingga sektor industri lebih bergairah. Pemerintah c.q (Bank Indonesia) mengendalikan stabilitas moneter terutama suku bunga, kredit, kurs valuta asing misalnya memberikan fasilitas diskonto, meningkatkan cadangan wajib minimum, himbauan moral bahkan jika diperlukan BI bisa melakukan investasi di pasar uang. Stabilitas moneter dan gairah sektor produktif diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekspor.

Kata kunci: Resenominasi Rupiah

A. PENDAHULUAN

Uang mempunyai peran sentral di dalam perekonomian modern. Berbeda dengan zaman dahulu kala, sekarang ini tanpa uang tidak mungkin ekonomi bisa berjalan karena tidak ada permintaan atau konsumsi rumah tangga (C). Di sisi lain, terlalu banyak uang beredar di masyarakat mengakibatkan terlalu banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran di pasar terbatas, maka tingkat inflasi akan meningkat, dan inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Stabilitas uang yang beredar berarti stabilitas ekonomi dan merupakan kondisi paling kritis untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak mengalami krisis ekonomi 1997-1998 telah menunjukkan kinerja yang menggemblakan. Lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka rata-rata di atas 5 persen per bulan. Bahkan di masa krisis keuangan global melanda dunia, Indonesia adalah salah satu dari negara Asia selain Cina dan India yang mampu menunjukkan kinerjanya serta masih mengalami pertumbuhan positif. Meskipun pasar saham di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan dan tertekan ditinjau dari aspek indeks pasar saham IHSG, tetapi kondisi pasar saham kembali mengalami kondisi stabil.

Perdagangan global yang telah dibuka naik di tingkat ASEAN termasuk perdagangan China dan Indonesia (CAFTA) memang meningkatkan volume

perdagangan disertai kondisi persaingan yang semakin ketat sehingga nilai ekspor Indonesia sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya sehingga secara tidak langsung menekan nilai mata uang rupiah. Berbagai kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif listrik PLN, ketersediaan bahan pokok menjelang lebaran dan gangguan cuaca mendorong inflasi pada tahun ini sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan inflasi juga mendorong kenaikan suku bunga di tengah-tengah sektor perbankan sedang berpacu dan berupaya meningkatkan jumlah plafon dan alokasi kreditnya.

Hal yang menarik di tengah-tengah kondisi ekonomi tersebut di atas, Bank Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2010 merencanakan suatu kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yaitu mengenai Redenominasi Rupiah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi, pengusaha dan profesional. Secara sederhana sebenarnya denominasi rupiah tidak lain mengurangi jumlah nol di belakang angka sehingga jumlah angkanya tidak terlalu besar di setiap transaksi dengan mata uang rupiah ketika kebijakan itu mulai diberlakukan. Menurut BI, ini perlu dilaksanakan karena uang pecahan Indonesia yang tersebar saat ini Rp. 100.000,-. Uang rupiah mempunyai pecahan terbesar kedua di Asia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun tidak memperhitungkan negara Zimbabwe yang pernah mencetak 100 milyar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang (www.banknotes.com).

Kebijakan denominasi sebenarnya bukanlah hal yang baru karena di masa lalu

pernah dilakukan dengan cara senering yaitu memotong uang secara fisik yang nilainya berubah menjadi dua kali lipat. Mungkin iklim politiknya sekarang berbeda, di mana pada masa orde lama lebih tertutup dan masyarakatnya masih tidak begitu memahami aspek kebijakan moneter dan kini di era reformasi iklimnya sangat terbuka dan lebih modern sehingga sangat sensitif dalam hal respon dan tuntutan masyarakat terhadap rencana kebijakan tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi tersebut di atas muncul anggapan di berbagai kalangan bahwa Redenominasi Rupiah akan menimbulkan gejolak moneter. Sampai sejauh mana kebijakan redenominasi berpengaruh terhadap indikator-indikator dan kinerja moneter di Indonesia jika kebijakan tersebut? Apakah kebijakan Redenominasi Rupiah akan menimbulkan gejolak psikologis di lingkungan masyarakat?

C. DENOMINASI RUPIAH

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Empat masalah yang penting dalam kebijakan moneter deluasa ini, yaitu : a) menyangkut pilihan mengenai apa yang sebaiknya dijadikan sebagai "sasaran antara" atau intermediate target, yang tidak lain adalah tingkat bunga atau jumlah uang yang beredar, b) pilihan mengenai konsep "uang beredar" (uang inti/B, uang jumlah uang dalam arti sempit/M1, jumlah uang dalam arti luas/M2, atau L); c) mengenai pilihan kebijakan moneter yang perlu dilaksanakan secara aktif (discretionary monetary policy) dan d) kebijakan moneter

yang berkaitan dengan "psikologi" dan "reaksi" masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Ini terkait dengan harapan na-sional (rational expectation). (Boediono, 1996).

Dalam hal kebijakan, pada prinsipnya jika mengacu pada teori Keynes, bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan daripada kebijakan moneter, sementara ahli ekonomi klasik kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal (Nofirin, 2000). Dasar kebijakan moneter sebenarnya mengacu pada teori klasik (teori Cambridge) atau teori kuantitas di mana uang hanya dipakai sebagai alat tukar dan perekonomian selalu dalam kondisi keseimbangan ($AD = AS$) pada tingkat kesempatan kerja penuh. Jumlah uang yang beredar dan kecepatan perputaran uang sebanding dengan harga rata-rata atau indeks harga dengan jumlah output yang ditransaksikan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kemudian disempurnakan oleh teori Keynes, di mana permintaan uang mempunyai dua tujuan yaitu untuk maksud transaksi (M_1) yang dipengaruhi oleh pendapatan dan untuk spekulasi (M_2) yang dipengaruhi oleh tingkat bunga.

Sirkulasi uang yang disetor perbankan dengan mengurangi debit-debit yang bersifat konsumtif (kartu kredit, KPR, kredit mobil, dll) dan lebih difokuskan pada sektor usaha yang produktif (terutama yang lebih banyak menggunakan bahan-bahan impor) atau usaha yang berorientasi ekspor. Bank-bank pelaksanaan memberi insentif kepada usaha-usaha tersebut dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit (modal kerja dan investasi) sehingga sektor industri lebih bergairah.

Pemerintah c.q (Bank Indonesia)

me-ngendaLikn stabilitas moneter terutama suku bunga, kredir, kurs valuta asing misalnya memberikan fasilitas diskonto, meningkatkan cadangan wajib minimum, himbauan moral bahkan jika diperlukan BI bisa mela-kukan investasi di pasar uang. Stabilitas mo-neter dan gairah

sektor produktif diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekspor.

Dalam hal-hal efek yang timbul akibat kebijakan moneter dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut (Aulia Pohan, 2008) :

Tabel 1. Korelasi Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian

No	Jalur	Efek Kebijakan	Akibat
1	Efek Subsitusi	Kelebihan uang akan dibelanjakan barang dan jasa	1. Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat 2. Produksi meningkat
2	Efek Suku Bunga	Kelebihan uang dibelikan financial asset	1. Permintaan terhadap financial asset menignkat 2. Suku bunga turun
3	Efek Kekayaan	Karena inflasi, masyarakat yang memiliki asset riil meraya lebih kaya	1. Merasa lebih kaya masyarakat akan meninggalkan konsumsi barang 2. Produksi meningkat
4	Efek Harapan Masyarakat	Masyarakat melakukan antisipasi terhadap inflasi	1. Pengusaha menignkatkan harga 2. Pekerja maminta kenaikan upah

Sumber : Aulia Pohan (2008)

Secara sederhana Instrumen Kebijakan Moneter meliputi : reserve requirement (RR), operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto dan himbauan moral (moral suasion). Indikator yang muncul dan paling mendasar adalah suku bunga dan uang beredar dan sasaran secara moneter yaitu: stabilitas harga, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan neraca pembayaran.

Kebijakan moneter terkait dengan sis-tem moneter (monetay system) yakni kebijakan-kebijakan dan instrumen-instrumen yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur penawaran uang. Bentuk fisik dari penawaran uang, pemecahan nilai unit uang (denominasi), dan besarnya jumlah penawaran uang (Imanudin Yuliadi, 2008). Sistem moneter di Indonesia terdiri atas Otoritas M-neter

(OM) yaitu Bank. Indonesia dan bank-bank yang menciptakan uang giral dan uang kuasi. Fungsi utama BI adalah : a) mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah; b) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa; c) pembinaan dan pengaluan terhadap bank-bank di Indonesia dan d) memegang kas pemerintah. Redenominasi adalah menyederha.na-kan denominasi (pecahan) mata uang men-jadi pecahan lebih sedikit dengan cara me-ngurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1. Hal sama secara ber-samaan dilakukan juga pada harga-harga ba-rang, sehingga daya beli masyrakat tidak ber-ubah. (Istanto). Berbeda dengan Sanering. Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan

nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi. Tujuan berikutnya, mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Sedangkan sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi). Redenominasi dilakukan pada saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali. Sedangkan sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi). Dampak bagi masyarakat pada redenominasi, tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama. Pada sanering, menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis. Pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan. Sedangkan pada sanering, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.

D. DAMPAK DEMONISASI RUPIAH

Dampak redenominasi rupiah jangan kaget. Jika tahun depan jadi dilaksanakan mungkin sudah mulai sosialisasi. Misalnya harga sebuah laptop adalah Rp. 5.000.000,- setelah redenominasi (3 digit) harga laptop itu akan menjadi Rp. 5.000,- saja. Bahkan ketika nonton siaran TV ada yang menyebutkan untuk awalnya akan diberikan 2 harga yang berbeda, pertama laptop dengan harga Rp. 5.000.000,- dan kedua laptop dengan harga Rp. 5.000,- (nilai uangnya

sebenarnya sama cuma karena dalam masa transisi biasanya ada sedikit kebingungan). Mungkin memang agak aneh awalnya dan perlu sosialisasi yang cukup lama, diperkirakan Redenominasi Rupiah ini akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun.

Memang benar nilai rupiah kita terlalu besar di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya "Your Currengi has too Maly Zero.s". Tetapi yang paling penting kita dengan adanya redenominasi rupiah kita hanya dapat berharap hal ini dapat dilakukan dengan tetap menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Bagi rakyat, tuntutananya sederhana saja, bagaimana pemerintah dapat melakukan yang terbaik agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhannya. Bila melakukan denominasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tentu akan didukung sepenuhnya. jika ada kepentingan lain yang ingin dicapai tentu ada baiknya ditunda dulu karena hal yang mendesak adalah meningkatkan kesejahteraan. Dalam bahasa sederhana : bagaimana rakyat dapat makan dan hidup dengan layak. Selain itu, yang paling penting dari semuanya itu adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kekuatan ekonomi kita sehingga mata uang kita mempunyai nilai yang lebih baik yang juga berarti rakyat makin sejahtera. Suatu saat nanti uang kita akan memiliki angka 0 (nol) yang sama kin sedikit bukan karena tulisannya disederhanakan seperti yang kita lihat didaftar harga makanan di cafe tapi memang karena nilainya yang tinggi. (www.kompasiana.com).

Dampak denominasi dalam hal Redenominasi Rupiah tidak terlepas dari kerangka besar (grnd framework) dari kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia. Secara sederhana ditinjau dari

aspek implementasi dan strategi yang dilakukan dapat digambarkan oleh Bank

Indonesia sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia



Terdapat 4 (empat) hal yang perlu di-pahami dalam memahami efektifitas kebijaksanaan moneter di Indonesia. Pertama, mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ketiga, sistem moneter di Indonesia dan Keempat, menyangkut hubungan antara uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi. (Tulus TI-I. Tambunan, 2009).

Untuk membahas ini perlu dikemukakan berbagai skenario tentang kemungkinan terjadinya inflasi yang meningkat dan inflasi yang menurun. Skenario pertama, Inflasi Meningkat, efek psikologi massa memegang peranan penting, yaitu keadaan di mana pedagang/produsen "menyesuaikan" harga-harga produk jadi bertambah mahal. Jika implementasi redenominasi dilakukan dengan menjadikan denominasi terkecil adalah Rp. 1, padahal Rp. 1 itu sendiri sebelumnya adalah Rp. 1.000,-, maka segala transaksi yang sebelumnya berdenominasi Rp. 100 - Rp. 900, otomatis terinflasi menjadi setara dengan Rp. 1.000 lama (yaitu Rp. 1 baru). Pedagang dan

produsen berspekulasi dan tidak mau rugi. Jika sebuah barang sebelumnya seharga Rp. 500. Dengan hilangnya denominasi Rp. 500, barang tersebut naik nilainya (inflate jadi Rp. 1. Jika kemudian ini tercapai secara serentak, merata dan masif, kenaikan inflasi tajam yang akan terjadi. Kemungkinan kedua justru Inflasi Menurun. Jika ternyata menanggapi redenominasi dengan mengadaptasikan pola konsumsi (karena tiba-tiba harga naik), justru hal sebaliknya bisa terjadi. Hilangnya denominasi ratusan, berarti hilang pula sebagian likuiditas. Berarti pula transaksi-transaksi mikro bernilai di bawah Rp. 1, juga hilang. Padahal secara teori, menurutnya suplai uang umumnya menghasilkan deflasi. Kemudian jika, hilangnya transaksi mikro tersebut malah membuat masyarakat beradaptasi dengan menyederhanakan pola konsumsinya, inflasi kemudian akan tertekan ke bawah. Pola konsumsi yang sebelumnya penuh variasi, kemudian karena redenominasi dan pemahaman perbandingan harga pre/paska redenominasi, masyarakat malah berhemat dengan mengurangi variasi konsumsi. Pada dasarnya kebijakan tersebut menimbulkan gejolak inflasi (naik atau turun), belum bisa diramalkan berapa lama jangka waktu

tersebut berlangsung. Perlu dilaksanakan dengan hati-hati. Paling tidak ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: masyarakat ragu secara psikologis sehingga mempengaruhi para pelaku pasar di dalam negeri, yang kedua justru keraguan pihak asing (investor) terhadap kepercayaan mata uang rupiah, sehingga intervensi asing langsung (foreign direct investment/FDI) mengalami penurunan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jikalau redenominasi rupiah digulirkan, yaitu :

- a. Kebijakan perekonomian yang berdampak luas kepada masyarakat, sebaiknya dipersiapkan dan disosialisasikan secara baik. Harus ada koordinasi antara pemerintah, BI, industri perbankan dan seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan ini. Efek psikologi massa akan menimbulkan persepsi yang salah di kalangan pengusaha, investor serta masyarakat konsumen pada umumnya.
- b. Apakah redenominasi rupiah akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan, selain itu uang menjadi praktis karena menjadikan pecahan mata uang lebih sederhana. Pengurangan angka nol memudahkan dan mengurangi ruang penulisan, perekaman dan percetakan, dan yang perlu sekali dipertimbangkan pergantian berbagai fasilitas administrasi tidak sederhana yang diperkirakan dan mungkin justru menimbulkan biaya operasional yang besar di seluruh instansi pemerintah maupun swasta.
- c. Sosialisasi harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan gejolak moneter. Sosialisasi harus dilakukan dengan matang, baik tentang arti maupun tujuan redenominasi. Ketidakmampuan sosialisasi akan mengganggu stabilitas ekonomi moneter sehingga dimungkinkan terjadi gejala. k inflasi, kenaikan suku bunga, penurunan nilai tukar rupiah, peredaran jumlah uang yang tidak terkendali yang justru membahayakan iklim moneter di Indonesia.
- d. Waktu dilakukan redenominasi rupiah, pemerintah menganalisa dengan baik sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap perekonomian. Misalnya dari sisi investasi, redenominasi tidak akan memberi imbas negatif terhadap investasi asing yang masuk ke Indonesia, sebab redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang itu sendiri. Tetapi di sisi lain ketidakpercayaan terhadap rupiah dan ketidakpastian hukum dikhawatirkan berdampak pada ketidakpercayaan berinvestasi di Indonesia.
- e. Redenominasi memerlukan biaya besar dari aspek penyesuaian sistem teknologi informasi. Apabila redenominasi diimplementasikan akan meningkatkan biaya operasional, terutama untuk pengaturan sistem dan penyesuaian materi cetak. Pengalaman sistem informasi, oleh karena itu harus bercermin dari kasus-kasus yang mengakibatkan tuntutan hukum, kerusakan yang menimbulkan ongkos yang sangat besar.
- f. Secara jangka panjang memang kebijakan ini terkesan sangat baik akan tetapi dengan syarat bahwa ekseseks yang muncul bisa diatasi dan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang digambarkan pada kerangka kebijakan moneter di Indonesia.
- g. Perlu dievaluasi terhadap persepsi yang masih keliru sehingga tidak percaya pada rupiah merupakan warisan sejarah

yang sulit dilupakan sehingga kebijakan redenominasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi politik yang benar-benar kondusif dan stabil.

- h. BI seyogyanya fokus pada inflasi yang sering menimbulkan distorsi perekonomian. Kembali pada tugas pokoknya dan bukan wacana kontraproduktif memang alternatif yang harus diprioritaskan daripada terjebak pada wacana redenominasi rupiah yang mengundang banyak polemik di semua kalangan masyarakat.
- i. Redenominasi pada saat diumumkan secara langsung berpengaruh kepada kurs dan sistem perdagangan atau pembayaran secara internasional yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu ringkasan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan perekonomian yang berdampak luas kepada masyarakat sebaiknya dipersiapkan dan disosialisasikan secara baik. Redenominasi Rupiah akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan, selain itu uang rnenjadi lebih praktis. Kebijakan ini tidak dilihat dari satu aspek saja, akan tetapi harus dipertimbangkan dari seluruh aspek lain seperti psikologi. massa, hukum, politik, keamanan dan
- b. Penerapan sosialisasi harus dipersiapkan dalam jangka panjang (5-10 tahun) agar tidak menimbulkan

gejolak moneter seperti inflasi, gejala suku bunga, daya tarik investasi asing yang dapat memperburuk perekonomian yang saat ini sudah menunjukkan fenomena yang membaik.

- c. Kebijakan redenominasi rupiah harus dilakukan dengan lebih mendalam sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap perekonomian bilamana benar-benar taat asas, hukum, konsistensi kebijakan dan tidak memperburuk keadaan di kalangan tnsasyarakat di mana situasi politik perlu dipertimbangkan secara aman dan kondusif.
- d. Redenominasi memerlukan biaya besar dari aspek penyesuaian sistem teknologi informasi meskipun secara jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan administrasi. Persepsi yang masih keliru sehingga tidak percaya pada rupiah harus diatasi dengan meningkatkan program sosialisasi yang tepat sasaran dan efektif.
- e. Bank Indonesia seyogyanya fokus pada aspek jangka panjang sesuai dengan implementasi dan strategi kebijakan moneter dalam hal pengendalian inflasi dan fokus pa da tugas pokoknya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, stabilitas kurs, pengendalian jumlah uang yang beredar dan stabilitas suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, (1996), Ekonomi Moneter, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
Nopirin, (2000), Ekonomi Moneter, Buku 1, BPFE, Yogyakarta.

- Pohan, Aulia, (2008), Potret Kebijakan Moneter Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pohan, Aulia, (2008), Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia, PT. 1- RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, (2009), Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yuliadi, Imanudin, (2008), Ekonomi Moneter, Penerbit Indesk, Jakarta.
- www.banknotes.com
- www.ekonomi.kompasiana
- Iwan Sulisty Weblog
- jakarta.detikpos.net

